

RI Dikecualikan dari Skema Tarif Baru Trump

Jakarta-Terkait dengan kebijakan tarif AS, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan RI termasuk dalam daftar negara yang telah mencapai kesepakatan dengan pihak Amerika Serikat. Karena itu, pemberlakuan tarif tambahan per 1 Agustus 2025 tidak akan berlaku bagi Indonesia. "Indonesia adalah negara yang sudah melakukan *deal* dengan Amerika Serikat. Jadi artinya beberapa negara yang sudah, itu sudah tidak berlaku lagi 1 Agustus," ujarnya.

■ NERACA

Airlangga mengatakan, negara-negara seperti Inggris, Vietnam, China, dan Indonesia telah dikecualikan dari skema tarif baru yang diumumkan sebelumnya. Meskipun Indonesia telah dikecualikan dari tarif tambahan per 1 Agustus, Airlangga menyebut bahwa tarif sebesar 10 persen tetap diberlakukan sebagai acuan saat ini.

Tarif tersebut merupakan hasil dari negosiasi sebelumnya dan akan terus menjadi dasar kebijakan hingga ada pengumuman lebih lanjut. Airlangga mengatakan bahwa perubahan tarif bisa terjadi lebih cepat atau lebih lama, tergantung proses finalisasi *joint statement* antara Indonesia dan Amerika Serikat.

"Nah, ini akan ditentukan kemudian menunggu *joint statement* dan pengumuman lanjutan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Tetapi yang tetap berlaku adalah tarif yang 10%," ujar Airlangga.

Airlangga juga menegaskan bahwa Indonesia tidak sedang menambah volume impor dari Amerika Serikat, melainkan melakukan reorientasi sumber pembelian.

"Terkait dengan pembelian produk Amerika, sebenarnya pembelian ini kita sudah lakukan, tetapi ada reorientasi negara," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, pekan ini.

Menurut dia, sejumlah produk seperti energi dan komoditas agrikultur selama ini telah diimpor dari berbagai negara, termasuk Amerika. Namun, dalam konteks hubungan dagang

terbaru, sebagian pembelian tersebut akan lebih difokuskan ke Amerika.

Usai menempuh rangkaian tahapan negosiasi yang intensif, kebijakan tarif impor AS untuk produk asal Indonesia berhasil mengalami penurunan signifikan hingga berada pada angka 19% yang sebelumnya menyentuh besaran 32%.

Keberhasilan tersebut merupakan implikasi dari kesepakatan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump, dimana Indonesia menjadi negara pertama yang mencapai kesepakatan pasca pernyataan resmi AS pada bulan Juli lalu.

Airlangga menyoroti bahwa pemberlakuan tarif yang dikenakan pada Indonesia merupakan angka terendah diantara negara kawasan ASEAN lainnya, serta sejumlah negara pesaing komoditas ekspor. "Nah kalau kita lihat angka-angka itu adalah angka yang terendah dibandingkan negara ASEAN yang lain, dimana Vietnam dan Filipina itu sampai saat sekarang adalah 20%. Kemudian Malaysia dan Brunei adalah 25%, kemudian Kamboja 36% dan Myanmar-Laos sebesar 40%, Thailand juga 36%. Dibandingkan pesaing untuk produk tekstil, kita juga melihat seperti negara Bangladesh 35%, Sri Lanka 30%, Pakistan 29% dan India 27%," ujarnya seperti dikutip *Liputan6.com*.

Selanjutnya, Airlangga menjelaskan bahwa terkait dengan tarif impor secara umum (MFN) di Indonesia, struktur Tarif Bea Masuk MFN yang diterapkan oleh Indonesia berdasarkan BT-KI (Buku Tarif Kepabeanan

Indonesia) 2022 yakni jumlah total pos tarif HS sebanyak 11.555 pos tarif, jumlah postarif dengan Bea Masuk (BM) 0% sebanyak 1.347 HS atau 11,7%, dan jumlah pos tarif dengan Bea Masuk (BM) 5% sebanyak 5.448 HS atau 47,1%.

"Nah dengan adanya perjanjian tersebut, maka Amerika kita perluas menjadi mayoritas 0% dan ini sudah kita berikan kepada CEPA yang lain, apakah itu dengan ASEAN-FTA, apakah itu dengan ASEAN-China FTA, kemudian juga dengan IEU-CEPA, kemudian dengan Kanada, dengan Australia, New Zealand, dengan Jepang, itu seluruhnya juga kita sudah memberikan mayoritas mendekati 0," ujar Menko Airlangga dalam sesi *doorstop*.

Selain menyepakati terkait penurunan tarif, kedua negara juga telah menyelesaikan berbagai hambatan

non-tarif (*non-tariff barriers*), yang menjadi tantangan dalam kelancaran perdagangan antarnegara. Hal tersebut nantinya juga akan dijelaskan lebih lanjut dalam *joint statement* resmi yang akan diumumkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tarif.

Negosiasi Mesti Setara

Penurunan tarif AS terhadap ekspor Indonesia dari 32% menjadi 19% sering disebut sebagai *deal* besar. Namun di balik angka itu, tersembunyi tekanan yang menempatkan Indonesia pada posisi lemah.

AS meminta Indonesia membeli produk mereka senilai total lebih dari US\$ 20 miliar mulai dari energi, produk pertanian, hingga puluhan pesawat Boeing. "Sebenarnya ini bukanlah negosiasi setara. Ini akan membebani fiskal dan menekan sektor strategis nasional," ujar Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, Selasa (22/7).

Menurut dia, Indonesia seharusnya melanjutkan negosiasi hingga tarif benar-benar equal. Bila AS bersikeras mempertahankan tarif 19%, Indonesia perlu memberlakukan kebijakan yang setara. "Keadilan dagang menuntut kita mene-



RAPAT TERBATAS MEMBAHAS KAWASAN EKONOMI KHUSUS : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Rapat terbatas tersebut membahas Kawasan Ekonomi Khusus.

rapkan prinsip *reciprocal retaliation*: bila barang kita dikenakan tarif 19%, maka produk mereka juga harus kena tarif 19%," ujarnya.

Di menyoroti agar Indonesia juga mengenakan tarif atau pajak 19% pada semua layanan digital dan IT perusahaan AS yang menguasai pasar domestik kita.

Dari jasa iklan digital, komputasi awan (*cloud computing*), hingga *platform* media sosial yang monetisasinya mengalir langsung ke Silicon Valley tanpa kontribusi fiskal setara di Indonesia. *Digital tax* semacam ini sudah mulai diterapkan Uni Eropa.

Bagi Indonesia, langkah ini adalah upaya menegakkan kedaulatan ekonomi digital dan menye-

imbangkan ketimpangan nilai tukar data dan nilai tukar devisa.

Achmad menjelaskan bahwa Indonesia tidak sendiri. Uni Eropa saat ini sedang menghadapi tekanan tarif sepihak serupa dari AS. Negara-negara BRICS juga menuntut perombakan arsitektur dagang global agar tidak didominasi unilateralisme negara besar.

"Sudah saatnya Indonesia menggunakan strategi bersama melalui platform multilateral, baik di WTO, BRICS+, maupun perundingan regional lainnya, untuk menegaskan bahwa praktik tarif resiprokal sepihak ala AS adalah *unfree trade*," ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia sekarang sedang menego-

siasikan berbagai perjanjian FTA dan CEPA dengan banyak pihak, termasuk Uni Eropa dan Eurasia. Achmad juga menegaskan perjanjian FTA dan CEPA harus menjadi sarana untuk menguatkan.

Strategi terbaik bukanlah menuruti tekanan dengan menambah impor demi penurunan tarif, tetapi menegosiasikan kesetaraan tarif dan membuka pasar dengan syarat transfer teknologi, investasi produktif, dan penguatan nilai tambah domestik. "Indonesia harus belajar dari pemerasan tarif AS dan memastikan negosiasi mendatang mencerminkan kedaulatan ekonomi dan keberpihakan pada kepentingan rakyat," ujarnya. 